



Research Article

Dinamika Moderasi Beragama: Studi Kasus Transformatif Konflik dan Perdamaian di Papua

Prabawati Dwi Utami^{1*}

¹ Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Fakultas Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*penulis korespondensi: prabawati99@gmail.com

Abstract

Article history:

Received 18 April 2024

Revised 19 April 2024

Accepted 25 April 2024

Keywords:

Conflict,
Moderation,
Religious,
Structuralism,
Tolerance,

In social reality, violence often occurs under religious, political and other pretexts, including in the socio-cultural context. Moderate Islam in Indonesia has become a characteristic in building a harmonious and tolerant society, however there is still a misunderstanding of the concept of moderation in religious concepts. Cases of religious conflict, especially in Papua, reflect the complexity between religions and regional government policies. This conflict, like the cases in Tolikara and Manokwari, reflects tensions between Islamic and Christian communities. Factors such as local politics, identity and economics also influence conflict dynamics. Handling conflict requires an understanding of the social structure, culture and political interests within it. The role of identity politics and government intervention is key in reducing religious conflict in Papua. This research uses a library method, namely by collecting data by analyzing thoughts and studying a phenomenon. By using Lewis Coser's conflict paradigm and Levi Strauss's structuralism to examine a case in Papua, the religious conflict cannot be simplified as just an intolerant problem, but rather as the result of social dynamics.

PENDAHULUAN

Membangun masyarakat yang damai dan sejahtera, diperlukan adanya pemahaman, empati dan toleransi dalam kehidupan, akan tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kekerasan dengan mengatasnamakan agama, politik dan sebagainya, begitu pula dalam sosial kebudayaan. Islam moderat merupakan konsep penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Di Indonesia yang mayoritas Muslim terbesar menjadikan Islam moderat sebagai ciri khas dan identitas dari kebijakan luar negeri (Afwadzi, 2020). Seringkali orang Indonesia mengalami kesalahpahaman terhadap konsep moderat dalam konteks keagamaan. Beberapa orang beranggapan bahwa seseorang yang memegang sikap moderat cenderung dianggap tidak teguh pendirian, kurang serius dan kurang berkomitmen dalam menjalankan agamanya. Karena mereka dianggap tidak menjalankan seluruh konsep agama yang menjadi pedoman hidup, yang mana menjadi pemisah antara perilaku pemimpin agama dengan prinsip yang harus diikuti. Sehingga menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa nilai-nilai moderat dan toleransi dalam beragama dianggap sebagai tindakan liberal

yang mengabaikan norma-norma agama yang sudah termaktub dalam teks keagamaan (Kemenag RI, 2019).

Seperti penelitian (Islamy & Amirullah, 2022) yang meneliti tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik antar umat beragama di Kota Jayapura. Hasilnya menunjukkan bahwa dimensi nilai moderasi beragama yang diimplementasikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama yaitu, nilai anti radikalisme dan toleransi dan nilai akomodatif terhadap kearifan lokal dan komitmen kebangsaan. Moderasi Beragama yang digadang-gadang oleh Kemenag dengan tujuan membangun Indonesia untuk terintegrasi ke dalam suatu sistem perencanaan Pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun panjang. Berdasarkan hal tersebut penulis berniat mengangkat fenomena yang terjadi di Indonesia terutama Papua menjadi salah satu fenomena yang menggambarkan kondisi sosial keagamaan pasca konflik 1998-2001, seperti konflik keagamaan yang terjadi antara kelompok agama yang berbeda atau pendukung agama dengan kepentingan serta adanya pembangunan masjid atau gereja yang menjadi perselisihan antaragama terhadap respon pertumbuhan banyaknya komunitas agama. Penelitian yang dilakukan oleh (Al Hakim dkk, 2023) berupaya untuk merekonstruksi identitas keagamaan yang menyokong resolusi kehidupan keagamaan pasca konflik di Papua dengan mendapat hasil sebagai berikut, pertama bahwa peristiwa konflik 1998-2001 di Papua secara garis besar disebabkan kurangnya nasionalisme dan menghargai sesama. Kedua, upaya moderasi beragama pasca konflik yang dilakukan oleh segenap agama dan ormas yang ada di Papua. Ketiga, moderasi beragama di Papua memberikan dampak yang besar bagi sosial dan agama. Kemudian seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mahyudin et al., 2022) yang mengkaji dinamika dan tantangan pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia di tengah perubahan sosial di era digital. Menemukan temuan bahwa ekspresi keagamaan yang ditunjukkan oleh pemeluknya tidak dapat dihindari dengan teknologi digital, yang bersentuhan dengan budaya sehingga memunculkan fragmentasi dan kontestasi.

Dalam konteks global, Islam moderat memiliki ciri khusus yang terkonstruksi di tatanan global melalui kebijakan luar negeri, namun perbincangan mengenai goyahnya Islam moderat mulai meluas hingga akhir ini, terutama pada kasus ketegangan agama yang terjadi di Papua tahun 2007. Dengan menggunakan paradigma klasik dan modern dalam menganalisis konflik tersebut. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eka, 2021) menunjukkan hasil penemuan gagasan yang ditulis oleh Feyerabend pada konflik di Papua mengenai Anarkisme Epistemologi yang tidak hanya didedikasikan bagi kepentingan dunia sains dan ilmiah tetapi juga sosial dan budaya, yang mana menurut Feyerabend gagasan tersebut tidak hanya penting dalam pengembangan metodologi melainkan sebuah pandangan kemanusiaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan kualitatif guna memperoleh data deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada kajian literatur terdahulu yang bertujuan untuk menganalisis pemikiran dengan membaca secara deskriptif terhadap suatu kasus menggunakan sudut pandang pemikiran, menggunakan referensi yang berasal dari buku, artikel, berita dan referensi berupa karya ilmiah (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konflik Ketegangan Agama di Papua

Konflik yang terjadi di Papua pada tahun 2007 akar utamanya adalah perpindahan penduduk Muslim dari daerah lain ke Papua, yang mengakibatkan munculnya berbagai kelompok baru yang bersifat eksklusif. Peristiwa yang terjadi di Manokwari tersebut berlangsung selama lebih dari dua tahun, dimulai dari tahun 2005, ketika masyarakat Kristen melakukan upaya untuk mencegah pembangunan masjid di daerah minoritas, dimana daerah minoritas Jerman yang membawa masuk agama Kristen ke Papua pada abad ke-19. Hal tersebut menjadi sorotan karena penolakan terhadap pembangunan masjid oleh umat Kristen yang memicu pemuka gereja setempat untuk memperkuat identitas, yang mana umat Muslim merasa bahwa penolakan pembangunan masjid tersebut tidak dapat ditolerir. Pada tahun 2007, DPRD membuat rancangan peraturan yang menanamkan nilai dan simbol Kristen dalam pemerintah

daerah dan mendiskriminasi Muslim. Rancangan tersebut peraturan tersebut memicu kemarahan di kalangan masyarakat Muslim di seluruh Indonesia, karena dianggap sebagai tindakan diskriminatif serta mengancam kebebasan beragama (CRSC.2015). Penulis beranggapan bahwa konflik tersebut mencerminkan adanya kompleksitas antar agama dan kebijakan pemerintah daerah yang ada, sehingga memicu adanya ketegangan antar komunitas Islam dan Kristen.

Penduduk Kristen, merasa bahwa kehadiran Muslim di Papua dapat mengancam posisi dan eksistensi secara bertahap. Selain itu, beberapa pendatang percaya bahwa yang mereka menghadapi ialah diskriminasi bahkan pengusiran dalam sistem demokratis. Perpecahan antar agama tentunya tak luput diwarnai dengan adanya politik, warga Papua Kristen merasa bahwa otonomi daerah belum cukup memadai, sementara pendatang Muslim melihat otonomi daerah sebagai ancaman dan pendukung kekuasaan pusat dari Jakarta. Ketegangan muncul karena bupati yang asal Papua beragama Kristen dan wakilnya dari luar Papua beragama Islam. Meskipun penduduk pendatang lebih dari 50%, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai jalan keluar bagi daerah yang penduduknya merasa terancam.

Pada daerah yang memiliki resiko konflik tinggi, penduduk Muslim di Papua yang bermayoritaskan bertempat di wilayah Kepala Burung bagian Barat Laut, memiliki potensi untuk berperan sebagai penghubung kedua belah pihak lewat sebuah organisasi bernama Majelis Muslim Papua. Dengan tegas organisasi tersebut berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai universal Islam dan mempertahankan budaya yang berakar pada tradisi Papua. Terbukti dengan adanya kejadian tersebut mampu meredakan ketegangan antar agama yang bekerja sama dengan Kristen.

Ketegangan lain terjadi di Papua tahun 2015 tepatnya di kabupaten Tolikara pada saat Idul Fitri yang menyebabkan kerusakan puluhan kios, rumah warga dan sebuah mushala ikut terbakar, serta terdapat korban jiwa yang tewas dari kerusakan tersebut. Peristiwa tersebut bermula ketika datangnya sekelompok orang yang diduga berasal dari umat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang melakukan protes terhadap pengeras suara yang mengganggu acara yang tengah digelar oleh umat GIDI di Mushala Baitul Mustaqin pada saat umat Muslim sedang melaksanakan solat Id (CRCS, 2015). Namun aksi protes tersebut dihalau oleh aparat keamanan yang berjaga di sekitar masjid, sehingga membuat aksi pemuda GIDI nekat dan kemarahan tersebut di respon dengan adanya tembakan peluru (Mahkamah RI, 2015).

Terdapat beberapa versi cerita mengenai insiden Tolikara, dalam pernyataan pendeta Dorman Wandikombo menyebutkan bahwa kejadian dimulai dari tembakan aparat keamanan terhadap dua pemuda GIDI yang sedang berdiskusi terkait peringatan yang dikeluarkan dua minggu sebelum Idul Fitri, yang menghimbau umat Muslim untuk tidak memakai pengeras suara. Tentunya peristiwa ini memicu kerusakan massa yang berujung pada pembakaran kios, rumah serta mushala. Versi lain menyebutkan insiden tersebut terjadi karena pemberitahuan oleh Badan Pekerja Wilayah Toli GIDI agar lebaran tidak dilakukan di wilayah Tolikara, akan tetapi pemberitahuan tersebut dilanggar yang akhirnya menimbulkan amuk masa.

Terlepas dari berbagai versi cerita tentang insiden tersebut terdapat hal yang penting dan perlu untuk disoroti. Pertama, mengenai penentuan waktu berlangsungnya kebaktian kebangunan Rohani (KKR) pemuda GIDI tingkat internasional, dalam tanggal nasional seharusnya dari jauh hari sudah diketahui bahwa Idul Fitri akan berlangsung tanggal 17-18 Juli 2015. Panitia yang sudah merencanakan jadwal seminar dan KKR pada tanggal 13 sampai 19 Juli 2015, tak ada salahnya jika memundurkan sedikit jam pelaksanaannya hingga pukul 10.00 WIT, sekaligus memberikan kesempatan pada umat Muslim untuk dapat melakukan solat Id. Kedua, imbauan GIDI agar orang Muslim tidak memakai pengeras suara saat salat dan yang lebih mengerikan lagi beredarnya selebaran yang tidak mengizinkan pelaksanaan salat Idul Fitri. Ketiga, tidak ada keamanan yang cukup oleh aparat keamanan, lokasi salat Id dengan tempat seminar hanya berjarak 250 m yang dimana berpotensi menyebabkan konflik diantara keduanya. Keempat, peraturan daerah yang diskriminatif, pada perda tahun 2013 yang hanya mengizinkan pembangunan gereja oleh GIDI, bukan oleh demonisasi lain.

Setidaknya hal ini pernah diungkap oleh (Juditha, 2016) dalam penelitiannya yang menunjukkan hasil bahwa konflik tersebut mengakibatkan konflik agama di Papua, yang mana berita tersebut dimuat

di Tempo.com sebagian besar yang mengedepankan orientasi perdamaian. Berita tersebut lebih menyoroti akar masalah konflik dan memperlihatkan tokoh yang bijaksana di luar pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Selain itu, sumber yang terlibat secara langsung tidak diungkap secara rinci serta opini tersebut bersifat absolut dalam orientasi kebenaran.

2) Paradigma Sosial terhadap konflik agama di Papua

Dari kasus di atas, maka penulis berinisiatif untuk menganalisis menggunakan teori konflik yang digagas oleh Lewis Coser dan teori strukturalisme Levi Strauss. Coser mencoba menambahkan sedikit konflik yang melebihi upaya mencoba menambahkan sedikit konsensus pada teori konflik. Analisis tersebut berfokus pada fungsi konflik sosial dan mencoba menunjukkan akibatnya, seperti contoh di atas yang terjadinya ketegangan agama yang memungkinkan akan berlanjut ke sistem berikutnya (Ritzer & Barry, 2018). Konflik adalah konsekuensi dari sebuah interaksi antara dua pihak. Terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab konflik, termasuk salah satunya masalah ketimpangan yang memicu rasa cemburu terhadap pihak tertentu, ketimpangan tersebut bersifat sosial, ekonomi, budaya maupun agama. Dengan terjadinya ketimpangan tersebut mengakibatkan adanya keinginan pada masyarakat untuk mempunyai otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya. Dapat diartikan bahwa, konflik tersebut menegaskan adanya reaksi antar kelompok dengan kelompok lainnya yang cenderung di masing-masing kelompok akan memperkuat kelompoknya masing-masing (Dodi, 2017).

Analisis yang menarik dari pernyataan Huntington yang berpandangan bahwa konflik global di masa depan tidak lagi di picu oleh faktor ekonomi, politik, dan ideologi, melainkan disebabkan oleh masalah SARA (suku, agama, ras, dan golongan). Ada beberapa alasan mendasar yang mendukung argument Huntington. Pertama, Huntington menekankan pada perbedaan antara peradaban bukan hanya bersifat nyata tetapi juga sangat mendasar. Kedua, dunia sekarang semakin sempit, interaksi antara individu dari berbagai peradaban semakin meningkat. Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan sosial global individu atau masyarakat kehilangan akar identitas lokal mereka. Keempat, tumbuhnya kesadaran peradaban dimungkinkan karena pesan ganda barat. Kelima, karakteristik budaya sulit disatukan karena kurangnya kompromi, di samping karakteristik, selain dari perbedaan politik dan ekonomi. Keenam, regionalisme ekonomi semakin meningkat (Wijaya, 2009).

Merujuk kepada fenomena yang terjadi di Tolikara tentunya memiliki tindakan afektif yakni tindakan yang telah ditentukan oleh kondisi yang berorientasi kepada emosional aktor. Dimana sekelompok pemuda GIDI bertindak secara emosional dengan tersulutnya emosi mereka yang tidak diperbolehkan oleh aparat keamanan. Tindakan tersebut merujuk kepada tindakan eksklusifisme dalam beragama yakni para penganutnya diarahkan untuk tidak toleran terhadap perbedaan dan kemajemukan. Sedangkan toleransi adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Ketika umat beragama menjalankan keberagaman dengan penuh emosional yang mengarah kepada sifat eksklusivisme, maka mereka beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh umat agama lain salah. Sikap keagamaan yang ditunjukkan dengan penuh amarah, emosional dan kaku hanya akan menyebabkan hilangnya kebijaksanaan dalam bersikap dan bertindak.

Dari kejadian tersebut adanya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia dengan motif agama, baik dalam agama itu sendiri maupun antar berbagai agama. Secara umum, di Indonesia terdapat kelas-kelas yang terisolasi satu sama lain (*isolated class*). Para pengamat dari luar mencermati sebagai konflik agama dan sosial-politik Indonesia, pada kasus Tolikara tersebut memperkuat mispersepsi yang menyamaratakan bahwa umat beragama Indonesia semakin tidak toleran. Peristiwa Tolikara dan Manokwari seharusnya dijadikan renungan dan momentum dalam evaluasi kembali kecenderungan, gejala dan dinamika kehidupan beragama di Indonesia menunjukkan adanya kasus-kasus intoleransi keagamaan seperti, yang terjadi di Tolikara yang memiliki potensi untuk berdampak negatif. Hal tersebut penting dikarenakan sejak peristiwa tersebut banyak pejabat yang cenderung melakukan *playing down*, pernyataan *playing down* mengisyaratkan akan enggan untuk mengakui adanya akar-akar masalah yang lebih fundamental. Seperti pernyataan Kepala Polri Jendral Badrodin Haiti yang menyatakan bahwa kasus Tolikara merupakan aksi kriminal dari adanya konflik keagamaan (*religious hatred*) (Azra, 2020).

Kedua penulis juga menganalisis konflik yang terjadi di Papua, menggunakan teori strukturalisme oleh Levi Strauss, karena dianggap relevan dengan fenomena yang dianggap sebagai suatu sistem fonologi struktural. Dalam kasus ketegangan yang terjadi di Papua, teori strukturalisme dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial, budaya, dan pola pemikiran yang mempengaruhi dinamika konflik tersebut. Teori ini lebih menekankan pentingnya memiliki hubungan dengan masyarakat dan saling berinteraksi (Badcock, 2022).

Strukturalisme merupakan sebuah metodologi dengan implikasi ideologis yang menyatu dengan semua ilmu ke dalam sistem keyakinan yang baru. Teori ini memandang teks sebagai sebuah struktur, yang mana struktur tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur tersebut. Levi Strauss lebih menekankan kepada relasi daripada entitas, artinya aktor utama yakni pada struktur bukan pada fungsi. Disebutkan dalam penelitian (Manshur, 2019) bahwa strukturalisme diyakini sebagai sebuah teori sastra yang berkaitan dengan linguistik. Pada perkembangannya strukturalisme tersebut meluas hingga ke semiotika karya sastra, hal tersebut yang memungkinkan strukturalisme-semiotika untuk mengkaji sebuah fenomena sebagai fakta sosial dengan norma dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dengan adanya kasus ketegangan di Papua tersebut lebih terkait dengan *internal change and culture*, khususnya dengan perubahan internal dan budaya sosial di tingkat masyarakat dan struktur sosial. Ketegangan tersebut tak lepas tentunya dari adanya perubahan internal dan budaya sosial. Hal tersebut mencakup dinamika internal masyarakat Papua terkait perubahan kebijakan, integrasi serta upaya mempertahankan aspek-aspek budaya yang dianggap penting oleh masyarakat Papua. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana konflik bertemu dengan kepentingan politik di dalamnya dengan memanipulasinya dengan simbol agama, dikarenakan adanya pilkada di daerah tersebut yang menyediakan kesempatan untuk berkembangnya jenis politik dengan identitas yang buruk. Dengan begitu faktor penting ialah politik lokal, serta terdapatnya faktor sosial-politik-ekonomi. Apakah hal tersebut dikategorikan akibat intoleransi agama? Tentunya tidak karena penjelasan dengan masalah intoleransi sangatlah mudah sama dengan halnya banyak konflik keagamaan di wilayah lain. Terlebih lagi respon aparat secara represif yakni tindakan yang bersifat keras, menindas dan membatasi kebebasan kelompok dengan menggunakan senjata untuk melukai bahkan membunuh. Daerah Tolikara merupakan daerah yang cukup rawan politik apalagi pada tahun 2015 terdapat Pilkada di daerah tersebut.

Hal serupa pula yang terjadi di Manokwari yakni dengan adanya politik identitas yang melatarbelakangi peristiwa yang terjadi. Politik identitas tersebut mengembangkan hegemoni dan dominasi agama lain di Manokwari dan menjadi politik yang diskriminatif, oleh karenanya pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi dalam merumuskan kembali gerakan politik identitas di Manokwari, agar tidak terjadi kecemburuan antar pengantar agama yang berpotensi memperbesar konflik tersebut (Saputra, 2017). Karena sesungguhnya yang menjadi cikal bakal adanya persoalan adalah ekonomi-politik, kecemburuan yang secara ekonomi dipadukan dengan masalah politik yang kemudian dimuat dengan masalah keagamaan, sehingga menjadi kerusuhan yang hebat (Syam, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap insiden Tolikara dan Manokwari, dapat disimpulkan bahwa ketegangan dan konflik agama di Indonesia sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti eksklusivisme, kebijakan yang diskriminatif, dan masuknya penduduk dari berbagai daerah. Insiden-insiden ini menyoroti perlunya evaluasi ulang terhadap praktik-praktik dan kebijakan keagamaan untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di antara berbagai komunitas agama. Insiden Tolikara menunjukkan konsekuensi dari tindakan keagamaan yang emosional dan eksklusif, di mana pemuda GIDI bereaksi dengan kemarahan dan intoleransi terhadap komunitas Muslim. Perilaku seperti ini menghambat kemampuan untuk berpikiran terbuka dan berkompromi dalam praktik-praktik keagamaan. Selain itu, konflik tersembunyi yang mendasari insiden tersebut, seperti yang dianalisis melalui teori konflik klasik, menunjukkan potensi ketegangan untuk meningkat dan mempengaruhi sistem sosial yang lebih luas.

Demikian pula di Manokwari, kehadiran politik identitas dan kebijakan diskriminatif turut berkontribusi terhadap konflik antara komunitas Kristen dan Muslim. Penolakan pembangunan masjid oleh komunitas Kristen dan peminggiran nilai-nilai dan simbol-simbol Muslim oleh pemerintah daerah menciptakan rasa kebencian di kalangan umat Islam secara nasional. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemerintah untuk secara aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan mempromosikan dialog antaragama. Hal ini termasuk menangani peraturan yang diskriminatif, menumbuhkan pemahaman dan rasa hormat di antara komunitas agama yang berbeda, dan mempromosikan rasa identitas dan kewarganegaraan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa, insiden Tolikara dan Manokwari menjadi pengingat akan pentingnya mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mengatasi eksklusivisme, kebijakan diskriminatif, dan politik identitas untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Dengan dilihat dari paradigma klasik bahwa ketegangan agama di Papua sebagai akibat dari adanya perbedaan budaya dan agama antara masyarakat asli Papua dan pendatang baru, sedangkan jika dilihat dari paradigma modern yakni sebagai akibat dari adanya politik dan ekonomi yang menjadi mobilisasi masa dan menyebarkan sentiment agama.

REFERENSI

- Al Hakim, L., & Abdurrahman, D. (2023). Moderasi Beragama di Papua: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 17(1), 49–64.
- Azra, A. (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah: dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisaasi Kesahalehan* (I. Thaha, Ed.). Pt. Kompas Media Nusantara.
- Badcock, C. R., & Abror, R. H. (2022). *Levi-Strauss: Strukturalisme dan Teori Sosiologi* (terjemah). Penerbit Insight Reference.
- Benny Afwadzi. (2020). Membangun Moderasi beragama di Taman Pendidikan al-Qur'an dengan Parenting washathiyah dan perpustakaan Qur'ani. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(2), 106–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/transformasi.v16i2.2647>
- Dodi, L. (2017). Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang). *Jurnal Al- 'Adl*, 10(1), 104–124.
- Eka Yanthi Sagita, D. (2021). Konflik Dan Solusi Papua Merdeka Dalam Pemikiran Paul Feyerabend. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(6), 182. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i6.440>
- Islamy, A., & Amirullah. (2022). Religious Moderation in the Paradigm of Religious Conflict Reconciliation in Jayapura-Papua. *Jurnal 12 Waiheru* , 8(1), 1–11.
- Juditha, C. (2016). Jurnalisme Damai Dalam Berita Konflik Agama Tolikara di tempo.co. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 2(2), 93–110.
- Mahyudin, Habib, M. A. F., & Sulvinajayanti. (2022). Dinamika Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Perkembangan Masyarakat Digital. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/ask.v5i2.3842>
- Manshur, F. M. (2019). Kajian Teori Formalisme dan Strukturalisme. *Gadjah Mada Journal of Humanities*, 3(1), 79–93.

- Penyusun Kementerian Agama Katalog Dalam Terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tanya Jawab Moderasi Beragama, T. R., & Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh. (2019). *TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA*.
- Ritzer, G., & Smart, B. (2018). *Handbook Teori Sosial* (terjemahan). Penerbit Nusa Media.
- Saputra, Ali. (2017). Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari. *Jurnal Mimikri*, 3(1), 15–27.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Syam, N. (2009). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Penerbit Kanisius.
- Tim penulis CRCS. (2018). *Tolikara, Idul Fitri 2015: Tentang Konflik Agama, Mayoritas-Minoritas dan Perjuangan Tanah Damai*. <https://Crcs.Ugm.Ac.Id/Tolikara-Idul-Fitri-2015-Tentang-Konflik-Agama-Mayoritas-Minoritas-Dan-Perjuangan-Tanah-Damai/>.
- Wijaya, A. (2019). *Hidup Beragama: dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*. Stain Ponorogo Press.